

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki karakteristik tersendiri dimana lembaga ini berfungsi sebagai wahana pengembangan potensi anak menjadi dewasa, anak sebagai warga negara. Dimana fungsi sekolah yang utama adalah pendidikan intelektual, yakni “ mengisi otak” anak dengan berbagai macam pengetahuan (Nasution 2004: 14)

Dan di sisi lain sekolah juga dapat dipandang sebagai suatu masyarakat yang utuh dan bulat yang memiliki kepribadian sendiri, dimana menjadi tempat untuk menanamkan berbagai macam nilai, pengetahuan, keterampilan dan wawasan. Dengan kata lain, sekolah sebagai masyarakat belajar, berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti menumbuhkan, memotivasi dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang mencakup etika, logika, estetika dan praktika, sehingga tercipta manusia Indonesia yang utuh dan berakar pada budaya bangsa.

Oleh sebab itu, sebagai masyarakat belajar, sekolah tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Sekolah merupakan satu kesatuan yang memiliki tata kehidupan budaya. Sekolah tidak hidup menyendiri, melepaskan diri dari tatanan sosial budaya dalam masyarakat, melainkan merupakan satu sistem atau subsistem dan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sekolah berada di tengah-tengah masyarakat, maka tata kehidupan yang berkembang dalam

masyarakat ikut mewarnai gerak langkah sekolah, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun bidang kehidupan yang lain. Sejarah menunjukkan bahwa sekolah lahir dari kebutuhan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, maka keberadaan sekolah berperan sebagai sarana dalam mewujudkan salah satu tujuan nasional yang telah ditetapkan oleh para pendahulu, ialah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, sekolah merupakan salah satu kebutuhan nasional yang tak terpisahkan dan perjuangan, sesuai dengan tuntutan zamannya.

Budaya kewarganegaraan atau *civic culture* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan suatu proses pembudayaan proses pembinaan watak dan karakteristik. Berkaitan dengan hal itu Almond (1999:410) menyimpulkan bahwa Budaya kewarganegaraan atau *civic culture* merupakan bagian suatu proses dan budaya politik. Menurut Winataputra menilai budaya kewarganegaraan sebagai sikap dan perilaku edukatif individu dalam konteks komunitas nasional yang berkewarganegaraan dalam membentuk karakter warga negara yang baik dan cerdas untuk meningkatkan sikap patriotisme siswa. Lebih lanjut budaya kewarganegaraan diartikan sebagai:

Budaya kewarganegaraan mengandung konsepsi nilai-nilai kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*) yang didalamnya mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), perilaku Kewarganegaraan (*civic disposition*), kemampuan kewarganegaraan (*civic skill*), kepercayaan diri kewarganegaraan (*civic confidence*), komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*) dan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) (CCE:1998).

Secara spesifik bahwa *civic culture* merupakan budaya yang menopang budaya kewarganegaraan secara utuh yang berisikan .. *a set of ideas that can be*

embodied effectively in cultural representation for the perpose of shaping civic identities artinya seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam repersentasi kebudayaan untuk pembentukan identitas warga negara. (Winataputra dan Budimansyah : 2007 ; 219)

Inti dari *civic culture* diantaranya pembinaan sikap patriotisme yang dimana sikap patriotisme merupakan suatu nilai yang sangat penting oleh setiap warga negara. Hal ini karena sikap setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam negara. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu bahwa, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini menunjukkan adanya kesinambungan antara hak dan kewajiban, dan tidak ada diskriminasi antara warga negara, baik mengenai hak maupun kewajibannya.

Budaya kewarganegaraan (*civic culture*) yang ideal dalam pengembangan sikap patriotisme siswa dapat kita serap serta memaknainya dan konsepsi komitmen siswa dapat mewujudkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, makna baru disekolah dapat mengembangkan nilai-nilai itu pada siswa dengan memaknai Sumpah Pemuda, Proklamasi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Wawasan Nusantara untuk mewujudkan karakteristik warga negara melalui pembelajaran. yang lebih dipopulerkan oleh Cogan (1998) sebagai warga negara yang cerdas dan baik atau *smart and good citizenship*.

Cogan (1999:4) mengartikan *civic education* sebagai "...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives". Atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.

Agar dapat berpartisipasi secara langsung dalam pengembangan sikap patriotisme pada diri siswa maka *civic culture* yang ideal, perlu dikembangkannya iklim atau suasana *civic culture* terlebih dahulu dengan melalui lingkungan Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan yang kondusif.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) persekolahan (*school civics*) yang bercirikan *civic culture* Indonesia yang ideal, dapat dikembangkan melalui PKn yang diperkaya dengan muatan lainnya yang bemaafaskan pendidikan agama dengan pengembangan budaya secara bersamaan.

Dimana misi substantif-akademis dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah mengembangkan struktur atau tubuh pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), termasuk di dalamnya konsep, prinsip, dan generalisasi mengenai dan yang berkenaan dengan *civic virtue* atau kebajikan Kewarganegaraan dan *civic culture* atau budaya kewarganegaraan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (fungsi epistemologis) dan memfasilitasi praksis sosio-pedagogis dan sosio-kultural dengan hasil penelitian dan pengembangannya itu (fungsi aksiologis).

Dilihat secara keilmuan menurut Winataputra (2001,2007) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang pendidikan yang memiliki tiga domain,

yakni Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan (*school civics*), Pendidikan Kewarganegaraan kemasyarakatan (*community civics*), dan Pendidikan Kewarganegaraan akademik (*academic civics*) Ketiga domain tersebut secara substantif tidak bisa dipisahkan secara saling terisolasi, karena ketiganya terikat oleh satu komitmen tujuan, yakni mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik atau *smart and good citizen* dalam konteks sosial-budaya Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) persekolahan (*school civics*), berada pada jalur pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan pada jalur pendidikan nonformal yang menurut Penjelasan Pasal 37 UU No. 20 tahun 2003 dikembangkan sebagai muatan kurikulum yang berfungsi mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kehidupan peserta didik dalam dunia persekolahan pada dasarnya merupakan prakondisi untuk menyiapkan diri sebagai warga sekolah atau *school citizen* (Winataputra; 2001). Untuk itu seyogyanya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di persekolahan harus mampu mengembangkan *civic culture* atau budaya kewarganegaraan. Dengan demikian sekolah dapat menjadi wahana pengembangan *civic culture* atau budaya kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan akademik (*academic civics*), sebagaimana di rumuskan oleh Winataputra (2001) merupakan khasanah pemikiran, penjabaran pemikiran ke dalam berbagai kegiatan, dan praksis kehidupan tentang bagaimana individu sebagai anggota masyarakat, anak bangsa dan warga negara yang dikristalisasikan sebagai konsep dan atau teori Pendidikan Kewarganegaraan . Dengan konsep teori itu diharapkan komunitas keilmuan Pendidikan

Kewarganegaraan secara konsisten mampu membangun Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bidang keilmuan yang handal. Khasanah pemikiran ini secara konseptual mencakup *civic culture* sebagai bidang telaah atau ontology dan bidang penerapan keilmuan atau aksiologi dan Pendidikan Kewarganegaraan seperti sebagaimana lazimnya suatu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, materi keilmuan Kewarganegaraan mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan dan nilai. Tiga komponen utama *Civic Education* menurut Branson (Wantoro : 217) adalah *Civic Knowledge*, *Civic Skill*, dan *Civic Dispositions*.

Dalam penjabaran ketiga domain tersebut peneliti mencoba untuk lebih fokus pada Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan (*school civics*), melalui konteks sistem pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur dan peran penting dalam memberi sumbangan terhadap terwujudnya fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut secara yuridis formal tersurat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 tahun 2003 pada Bab 2 Pasal 3, sebagai berikut.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kesemua itu dapat direkonseptualisasi bahwa aspek kepribadian warga negara yang perlu dikembangkan adalah menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (Visi Pendidikan Nasional menurut UU No. 20/2003). Sejalan dengan Visi

Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Cerdas komprehensif dimaksud meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

- (1) **Cerdas spiritual**, yakni mampu beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.
- (2) **Cerdas emosional**, yakni mampu beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.
- (3) **Cerdas sosial**, yakni mampu beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang:
 - membina dan memupuk hubungan timbal balik;
 - demokratis;
 - empatik dan simpatik;
 - menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - ceria dan percaya diri;
 - menghargai kebhinnekaan dalam bermasyarakat dan bermegara;serta
- (4) **Cerdas intelektual**, yakni mampu beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; dan aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif.
- (5) **Cerdas kinestetik**, yakni mampu beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas; dan aktualisasi insan adiraga.

Adapun yang dimaksud dengan insan Indonesia yang **kompetitif** adalah memiliki seperangkat kompetensi sebagai berikut.

- a. Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan;
- b. Bersemangat juang tinggi;
- c. Mandiri;
- d. Pantang menyerah;
- e. Pembangun dan pembina jejaring;
- f. Bersahabat dengan perubahan;
- g. Inovatif dan menjadi agen perubahan;
- i. Produktif;
- h. Sadar mutu;
- i. Berorientasi global; dan
- j. Pembelajar sepanjang hayat. (Budimansyah dan Suryadi; 2008 :21)

Fenomena saat ini pendidikan dalam masyarakat seperti dalam keluarga bagi sebagian orang tua zaman sekarang, seolah-olah tidak lagi mempunyai waktu untuk mendidik anak-anaknya karena sebagian waktunya dihabiskan di luar rumah. Tuntutan pekerjaan telah menguras waktu dan tenaga yang pada akhirnya tanggung jawab untuk mengasuh dan membina anak diserahkan kepada sekolah. Pihak keluarga memiliki harapan atau anggapan bahwa seluruh pendidikan anak, akan berjalan dengan baik sepenuhnya di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang dapat membentuk watak yang dapat sesuai dengan harapan para orang tua, padahal keutuhan watak yang terbentuk di sekolah belum menjadi proses pembentukan watak yang sepenuhnya, karena siswa masih harus berhadapan langsung dengan keadaan kehidupan yang sesungguhnya sebagai masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas manusia yang berbangsa dan bernegara.

Dalam suatu penelitian tentang jati diri “*citizenship education*” yang melaporkan temuan David Kerr (1999: 5-7) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan

minimal, didefinisikan secara sempit, hanya mewadahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran Kewarganegaraan, bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan. Menitikberatkan pada proses pengajaran, hasilnya mudah diukur. Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan **maksimal**, didefinisikan secara luas, mewadahi berbagai aspirasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Kombinasi pendekatan formal dan informal, dilabeli *citizenship education*, menitikberatkan pada partisipasi siswa melalui pencarian isi dan proses interaktif di dalam maupun di luar kelas.

Sejalan dengan itu maka Mahoney (Soemantri 2001:295) merumuskan bahwa batasan dari *Civic Education* adalah memasukkan seluruh kegiatan sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikulemya dalam kerangka *Civic Education*: kegiatan di dalam dan di luar kelas, diskusi, dan organisasi siswa (*Student Government*). Pendeknya, seluruh kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawab sekolah untuk dimasukkan kedalam *Civic Education*.

Untuk itu PKn yang merupakan ranah untuk menjadikan manusia Indonesia yang *good citizen* belumlah cukup karena secara konseptual bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki suatu konsep yang mengarah pada suatu gerakan yang dinamai dengan “*Community Civic*”. Dalam penelitian ini ingin mengungkapkan perlunya pengembangan budaya kewarganegaraan yang bukan hanya cukup dilakukan melalui pembelajaran PKn saja tetapi perlu ada suatu kegiatan yang mengacu pada misi dan visi dari Pendidikan Kewarganegaraan . Untuk memungkinkan hal tersebut di atas perlu dilakukan penataan dan peningkatan kualitas mata pelajaran PKn agar mampu menjadikannya sebagai mata

pelajaran yang kuat dan berwibawa (*powerful learning area*) yang sarat dengan pengalaman belajar. Pola pembelajaran demikian memiliki ciri-ciri bermakna, terintegrasi, berbasis nilai, menantang dan mengaktifkan. Kegiatan ekstra mural adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di luar lingkungan kelas. Bentuk-bentuk kegiatannya berkaitan dengan materi PKn yang tidak dapat dituntaskan dalam kegiatan tatap muka di kelas.

Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka pengembangan sikap patriotisme siswa dilakukan secara terjadwal dan fleksibel, dengan memperhatikan kemajuan kegiatan kurikuler, Kedalaman dan ritme dalam belajar, kegiatan ini dilaksanakan dengan bimbingan para pembina yang menguasai bidangnya masing-masing dan guru PKn dapat mengambil peran dalam upaya menyelesaikan program ekstrakurikuler dengan pembelajaran PKn

Yang dimaksud kegiatan ekstrakurikuler dalam kerangka *Civic Education* yang diselenggarakan di luar jam pelajaran, selain membantu siswa dalam pengembangan minatnya, juga membantu siswa agar mempunyai semangat baru untuk lebih giat belajar serta menanamkan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang mandiri. Bahkan pengertian *civic education* ini diperluas oleh *National Council for Social Studies (NCSS)* yang dikutip Wuryan dan Syaifullah (2008:6) sebagai berikut:

Citizenship Education is a process comprising all the positive influence which are intended to shape a citizens view to this role in society. It comes powerly from formal schooling psrtly from parental influence and partly from learning outside the classroom and the home. Through citizenship education, our youth are helped to again understanding of our national ideals, the common good and the process of self government. (NCSS, 1970 : 20)

Berdasarkan definisi ini bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) memperoleh pengaruh-pengaruh positif dari:

- Pendidikan di sekolah;
- Pendidikan di rumah;
- Pendidikan di luar kelas dan sekolah.

Hal-hal tersebut harus mendapatkan pertimbangan dalam menyusun pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan *civic education* agar siswa dapat memahami dan mengapresiasi cita-citanya.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) persekolahan (*school civics*) yang bercirikan *civic culture* Indonesia yang dapat dikembangkan sekolah, melalui PKn tetapi juga dapat melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diperkaya dengan muatan lainnya yang bernafaskan Pendidikan Kewarganegaraan dengan pengembangan budaya secara bersamaan yang diarahkan untuk “*nation and character building*”.

Didalam lingkungan sekolah yang ingin diciptakan melalui kegiatan ekstrakurikuler adalah setidaknya sekolah memiliki upaya-upaya sadar untuk memberikan kontribusi dalam pembangang sikap patriotisme siswa. Dalam hal ini kurikulum pembelajaran PKn dan kontribusi kegiatan ekstrakurikuler, dalam pembangunan karakter bangsa, dapat diwujudkan dalam bentuk tranformasi *civic knowledge*, *civic disposition*, dan *civic skills* untuk menciptakan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) yang ideal.

Hal ini sejalan dengan pendapat **Miller Mayeer** yang dikutip oleh Tim Dosen IKIP Malang yang mengatakan bahwa :

Keikutsertaan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler akan memberikan sumbangan yang berarti bagi siswa untuk mengembangkan minat-minat baru, menanamkan tanggung jawab sebagai **warga negara**, melalui pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan kerja sama, dan terbiasa dengan kegiatan-kegiatan mandiri (1988 ; 124).

Terkait dengan uraian tersebut di atas, alangkah lebih idealnya jika pengembangan sikap patriotisme yang bersumber pada nilai patriotisme yang merupakan salah satu bagian dari aspek pembentukan warga negara bertanggung jawab. Johnson (dalam Nurdin 2008 : 82) merumuskan *its central purpose is helping student become participating citizens and well adjusted individuals*, Pembentukan seorang warga negara yang baik, yang bertanggung jawab, pada dasarnya merupakan aktualisasi dari nilai-nilai patriotisme. Sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air dan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara patriotisme merupakan nilai yang sangat penting dimiliki oleh setiap orang untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Karena itu, pembentukan kesadaran patriotisme adalah bagian nilai kewarganegaraan yang relevan dan sangat penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Pengembangan budaya kewarganegaraan yang merupakan domain Pendidikan Kewarganegaraan, dimana Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai mata pelajaran belum dirasa cukup untuk mengakomodasikannya maka dirasa perlu suatu kegiatan yang berkualitas dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*) salah satunya adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler yang memuat kegiatan-kegiatan yang dapat diselenggarakan di sekolah untuk memantapkan pembentukan kepribadian yang mengedepankan aspek-aspek pengembangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) di sekolah.

Dalam penelitian ini penulis meyakini bahwa pengembangan sikap patriotisme siswa yang dipengaruhi oleh pengembangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) melalui kegiatan ekstrakurikuler selain melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasi dan dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut “Bagaimanakah *Civic Culture* melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat membina sikap patriotisme “ Masalah tersebut di perjelas dengan sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pengembangan budaya kewarganegaraan (*Civic Culture*) terhadap pengembangan sikap patriotisme ?
2. Bagaimanakah pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap pengembangan sikap patriotisme ?
3. Bagaimanakah pengaruh *Civic Culture* dan kegiatan ekstrakurikuler terhadap pengembangan sikap patriotisme ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut diatas, maka secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara objektif tentang bagaimana pengembangan budaya kewarganegaraan melalui kegiatan ekstrakurikuler sekolah.

Tujuan penelitian diperjelas menjadi tujuan khusus, sebagai berikut :

1. Menganalisis substansi pengembangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah didesain agar dapat mengembangkan sikap patriotisme.
2. Menganalisis muatan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di sekolah agar dapat mengembangkan sikap patriotisme siswa.
3. Menganalisis diskripsi keterkaitan antara pengembangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dengan Ekstrakurikuler di sekolah dalam pengembangan sikap patriotisme siswa.

b. Manfaat Penelitian

Bertitik tolak dari masalah, sub masalah, serta tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan *civic culture* melalui kegiatan ekstrakurikuler dalam kehidupan sehari-hari yang perlu dikembangkan di persekolahan dalam meningkatkan sikap patriotisme siswa di sekolah.

b. Secara Khusus

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- 1) Bagi Sekolah, Diharapkan setiap sekolah dapat membentuk dan mengembangkan budaya kewarganegaraan di sekolahnya melalui kegiatan ekstrakurikuler dalam meningkatkan sikap patriotisme.

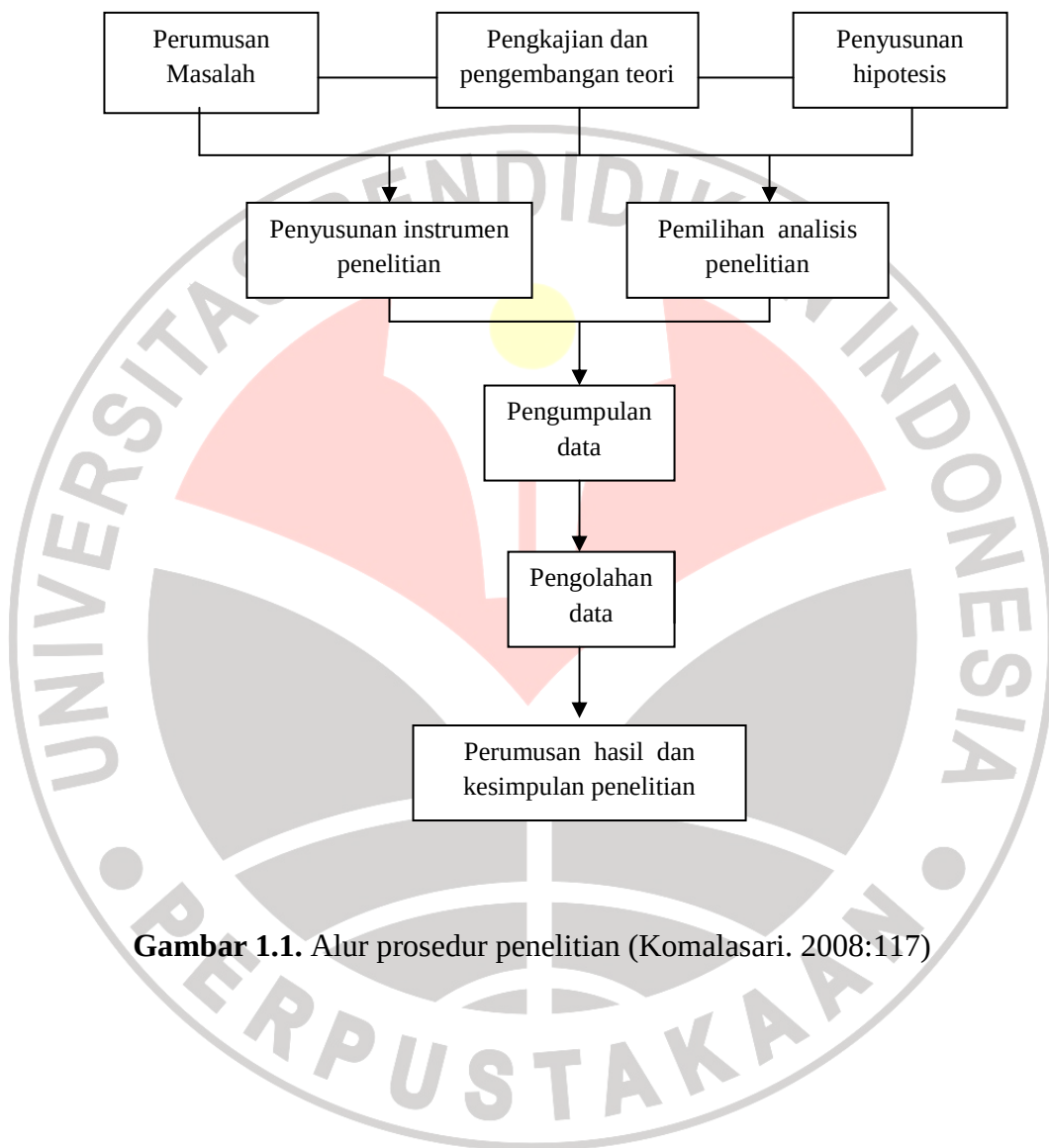
- 2) Bagi Siswa, Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk siswa dalam rangka pengembangan budaya kewarganegaraan melalui kegiatan ekstrakurikuler dalam meningkatkan sikap patriotisme
- 3) Bagi Penulis, Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah inspirasi bagi peneliti PKn lainnya untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai budaya kewarganegaraan (*civic culture*) pada lingkungan atau komunitas lainnya.

D. Asumsi Penelitian

1. *Civic culture* berperan memberi kontribusi dalam identitas kewarganegaraan atau ke indonesiaan setiap warga negara dalam meningkatkan sikap patriotisme siswa disekolah
2. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang diselenggarakan diluar jam pelajaran yang bertujuan membina watak, mental, kepribadian serta keterampilan dalam upaya meningkatkan sikap patriotisme siswa

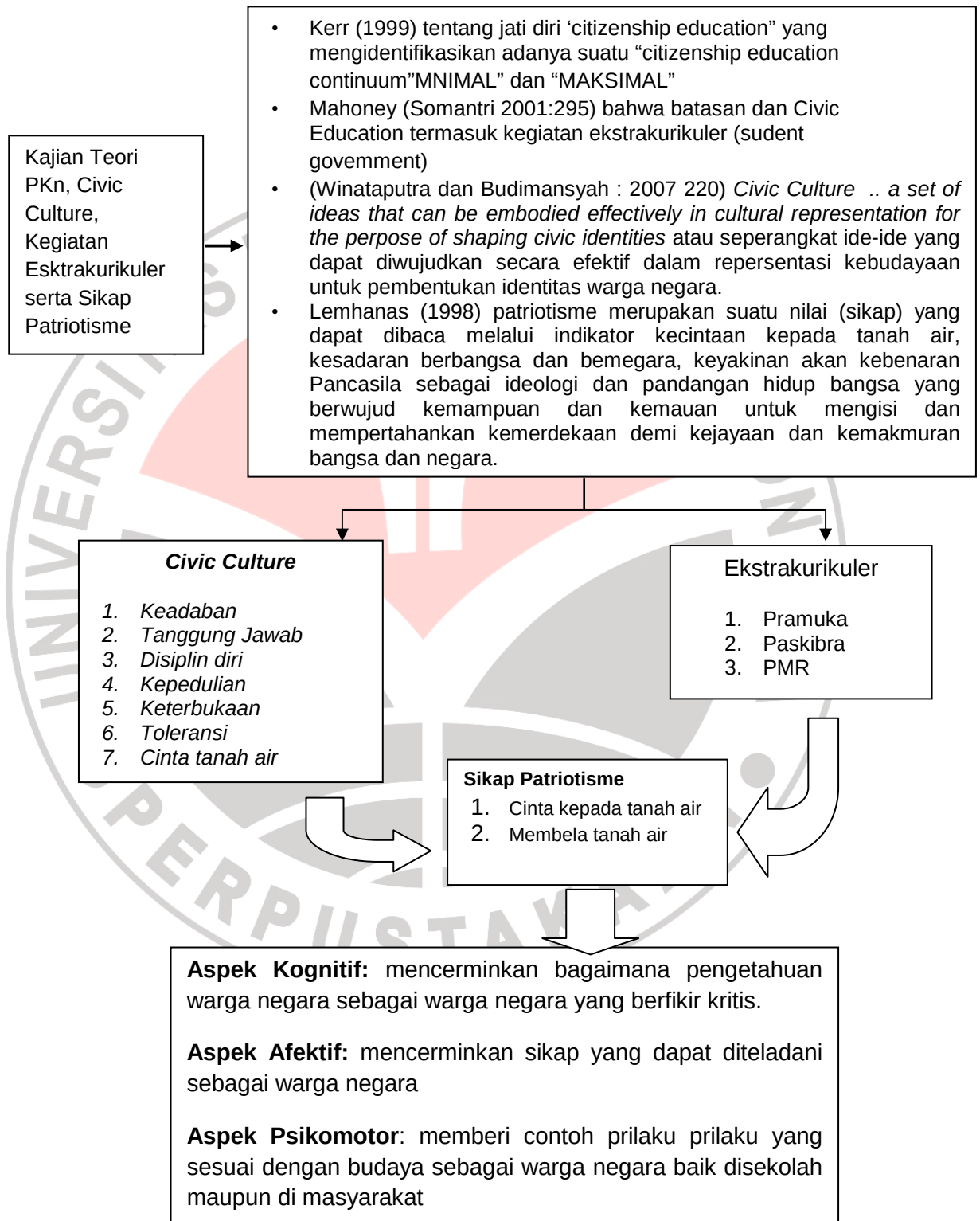
E. Paradigma dan Kerangka Pemikiran Penelitian

a. Paradigma Penelitian



Gambar 1.1. Alur prosedur penelitian (Komalasari. 2008:117)

b. Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran Penelitian

F. Hipotesis Penelitian dan Variabel Penelitian

1. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan asumsi diatas sikap patriotisme pada diri siswa dapat ditingkatkan dengan pengembangan budaya kewarganegaraan melalui kegiatan ekstrakurikuler disekolah

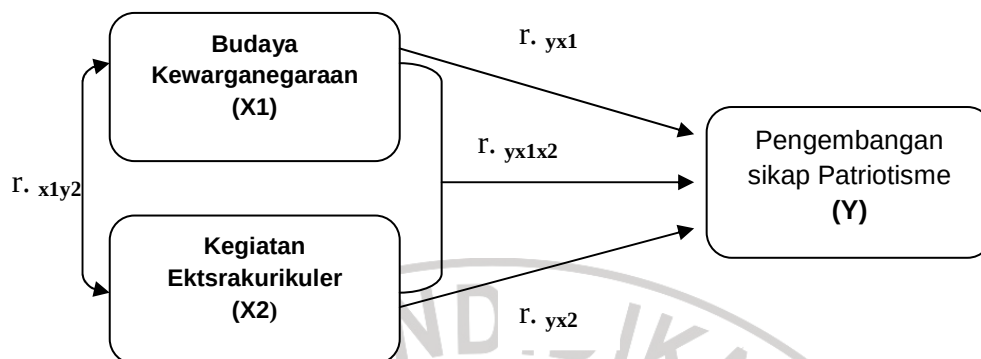
- a. Pengembangan budaya kewarganegaraan memiliki pengaruh positif terhadap pengembangan sikap patriotisme siswa
- b. Kegiatan ekstrakurikuler berpengaruh positif terhadap pengembangan sikap patriotisme siswa
- c. Pengembangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dan Kegiatan ekstrakurikuler secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pengembangan sikap patriotisme siswa

2. Variabel Penelitian

Menurut Kerlinger dalam Sugiono (2007 : 61) menyatakan bahwa variabel adalah konstruk (*constructs*) atau sifat yang akan dipelajari. Dibagian lain Kerlinger menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (*different values*). Selanjutnya Kidder (1981), menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas (*qualities*) dimana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya.

Berdasarkan pengertian diatas maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Keterkaitan Variabel Bebas dan Variabel Terikat



Gambar 1.3. Keterkaitan Antar Variabel penelitian

Keterangan :

X1 = Variabel bebas (*independen*) : Pengembangan Budaya Kewarganegaraan

X2 = Variabel bebas (*independen*) : Kegiatan Ekstrakurikuler

Y = Variabel terikat (*dependen*) : Pengembangan Sikap Patriotisme

G. Definisi Operasional

Dalam rumusan masalah tersebut terdapat tiga konsep utama yang perlu diberikan definisi operasional, yakni: Kegiatan Ekstrakurikuler, Budaya kewarganegaraan (*civic culture*) Serta Pengembangan Sikap Patriotisme. Untuk masing- masing konsep tersebut dapat diberi definisi secara operasional sebagai berikut.

a. Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler adalah bagian integral dan keseluruhan proses pembelajaran dalam upaya memfasilitasi perwujudan potensi yang dimiliki siswa. Berdasarkan Permendiknas No.22 Tahun 2006 mengatakan bahwa:

Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah/madrasah

Kemudian Wahjosumidjo (2008:256) mengemukakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah :

Kegiatan-kegiatan siswa diluar jam pelajaran, yang dilaksanakan disekolah atau diluar sekolah , dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, memahami keterkaitan antara berbagai mata pelajaran, penyaluran bakat dan minat, serta dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan para siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, berbudi pekerti luhur dan sebagainya.

Oleh karena itu, kegiatan ekstrakurikuler tersebut memiliki nilai strategis dalam proses pembentukan pribadi santun pada siswa. Untuk memberikan gambaran konseptual mengenai kegiatan ekstrakurikuler dimaksud, akan dipaparkan dalam uraian berikut dimana Suryosubroto (1997: 275). mengelompokkan kegiatan ekstrakurikuler kedalam dua jenis, yakni :

Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat atau berkelanjutan, yaitu jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus menerus selama satu periode tertentu. Untuk menyelesaikan satu program kegiatan ekstrakurikuler diperlukan waktu yang sama. Dimana Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat periodik atau sesaat, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat periodik atau sesaat. Oteng Soetisna (1983: 56). Dalam perspektif lainnya, dijelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler tersebut sangat beragam jenisnya Hal tersebut.

sebagaimana dinyatakan oleh bahwa Kegiatan ekstrakurikuler itu terdiri dan bermacam-macam kegiatan seperti organisasi murid seluruh sekolah, organisasi kes dan organisasi tingkat-tingkat kelas, kesenian, klub-klub hobi, pidato dan drama, klub yang berpusat pada mata pelajaran, publikasi sekolah, atletik dan olah raga, organisasi-organisasi yang disponsori secara kerjasama. Dari kedua pendapat tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan diluar jam pelajaran dimana kegiatan tersebut dilaksanakan baik secara priodik maupun non priodi yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan (*knowledge*) serta keterampilan (*skill*) siswa dalam mengembangkan konsep serta ide yang ada pada siswa dalam bentuk komunitas atau organisasi baik yang ada di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Dalam penelitian ini kegiatan ekstrakurikuler yang diteliti adalah kegiatan Pramuka, Paskibra dan Palang Merah Remaja (PMR).

b. Budaya Kewarganegaraan (*civic culture*)

Civic culture terbentuk dan dua kata yakni *civic* dan *culture*. Secara harfiah *civic* diartikan oleh Kipper, (1999:129) sebagai *civil*, *civil* itu sendiri diartikan diantaranya sebagai *civilian*, yang memiliki arti diantaranya sebagai *citizen* yang diartikan sebagai *person native of country* atau menjadi warga negara. Warga negara menurut Endarmoko, (2006:709), adalah orang, penduduk, Kewarganegaraan, kebangsaan, kerakyatan. Sedangkan *culture* menurut Reading, (1986:96) merupakan totalitas tingkahlaku yang dipelajari serta diturunkan dan satu generasi ke generasi yang lain; tingkahlaku yang paling mungkin terulang kembali dalam masyarakat (*Wallace*); jenis tradisi dimana simbol ditranmisikan

dan satu generasi ke generasi lain melalui *social learning*. Secara garis besar *culture* memiliki arti sebagai kebudayaan. Dalam penelitian ini *civic culture* memiliki arti *behaviour between persons and groups that conforms to a social mode, as itself being a foundational principle of society and law* (<http://en.wikipedia.org/wiki/civility>,). Hal tersebut dapat diartikan sebagai keberadaan masyarakat yang terwujud dalam perilaku diantara orang-orang dan kelompok-kelompok yang dikehendaki adanya tatakrma kehidupan sosial. Hal itu merupakan prinsip yang mendasar sebagai warga negara atau masyarakat hukum yang demokratis melalui pendidikan agar terciptanya Kewarganegaraan yang baik atau *to be a good citizenship*. Sementara Winataputra dan Budimansyah (2007: 220) *Civic Culture .. a set of ideas that can be embodied effectively in cultural representation for the perpose of shaping civic identities* atau seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam repersentasi kebudayaan untuk pembentukan identitas warga negara.

Dalam penelitian ini penulis mengartikan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) sebagai sikap dan perilaku yang dilakukan oleh masing-masing individu dalam satu komunitas atau kelompok yang secara sosial diakui serta dianggap penting oleh sekolah, masyarakat dan negara dengan indikator keadaban, tanggung jawab, kepedulian, keterbukaan serta cinta kepada tanah air.

c. Sikap Patriotisme

Sikap patriotisme adalah sikap, yang berani pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata “patriot” dan “isme” yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan. Atau “*heroism*” dan

“ *patriotism*” dalam bahasa Inggris. Pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta benda maupun jiwa raga.

Francis W. Cooker (dalam Nurdin 2008 : 70) mengemukakan bahwa patriotisme merupakan suatu atribut yang universal pada setiap manusia, atau pun sebagai identifikasi individu terhadap kelompoknya. Thoker dalam Nurdin (2008 :71) mengatakan bahwa ciri seorang terhadap kelompoknya atau yang mengatakan bahwa ciri seseorang terhadap kelompoknya atau yang membedakan dengan yang lainnya terhadap kelompoknya dapat dilihat dan loyalitas orang tersebut terhadap kelompok mana artinya, status kelompok (kewarganegaraan) seseorang tidak bisa hanya dilihat dan ciri-ciri formal tetapi ”yang lebih penting lagi adalah loyalitas orang tersebut”, dalam *Britannica World Language* (1955 :962) bahwa patriotisme dapat timbul oleh berbagai hal

- 1) Kekaguman terhadap amanat dan kebiasaan suatu bangsa
- 2) Kebanggaan terhadap sejarah dan kebudayaannya
- 3) Rasa memiliki terhadap bangsanya

Sedangkan, menurut *Dictionary of Sociology and Related Science* (1962 : 215), bahwa Patriotisme itu timbul berdasarkan pengalaman-pengalaman masa kecil, masa muda, dan ikatan pertama seseorang terhadap tanah air dan lingkungan masa depannya.

Berdasarkan ketiga sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat mementingkan diri sendiri, kelompok, atau golongan, sikap hidup eksklusif, acuh tak acuh terhadap budaya dan bangsanya, serta tanah airnya, merupakan antagonis dan esensi patriotisme. Dengan bersemayam pada diri individu/suatu kelompok,

maka motivasi untuk membangun negara, bangsa, dan masyarakatnya pun akan rendah (bahkan mungkin tidak ada). Kalaupun Ia terlihat melakukan aktivitas (usaha), itu hanya untuk kepentingan pribadi atau pun kelompoknya saja.

Merujuk pada uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa patriotisme merupakan suatu nilai (sikap) yang dapat dibaca melalui indikator kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa yang berwujud kemampuan dan kemauan untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan demi kejayaan dan kemakmuran bangsa dan negara.

